

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



RENCANA KERJA TAHUN 2023

BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 dan capaian Renstra-PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2022.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	27
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	37
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.....	40
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	43
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra-PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan Renja-PD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja dengan melalui 6 (enam) tahapan proses penyusunan Renja-PD, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renja-PD melalui peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja-PD harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud terdapat sinkronisasi dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodelikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal tersebut telah menjadi babak baru bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan dan mengacu pada perubahan nomenklatur pada level sub kegiatan, yaitu dengan penambahan *metadata sub kegiatan* sebagai sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub kegiatan. Atribut informasi yang ditambahkan pada metadata sub kegiatan terdiri atas kinerja, indikator dan satuan

Penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode Renstra sehingga perlu diperhatikan upaya pencapaian seluruh target pada Renstra tersebut.

Penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra tahun berjalan (tahun 2022) dan pada akhirnya Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan RKA, sebelum ditetapkan menjadi DPA Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 164, Tambahan Lembaran Negara No. 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - i. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
- v. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- w. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- x. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50); dan
- y. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta untuk memberikan arah dan acuan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel di Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan untuk penyusunan RKA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

2. Menyediakan perencanaan tahunan yang konsisten, implementatif dan tolak ukur penilaian kinerja; dan
3. Sebagai sarana pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumwn Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD dan Renstra-PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappelitbangda Prov. Sulsel, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda Prov. Sulsel.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra-PD

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 dan pencapaian target Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan tahun 2022, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappelitbangda Prov. Sulsel dan/atau realisasi APBD Bappelitbangda Prov. Sulsel, dengan materi yang disajikan berisi penjelasan tentang realisasi program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor penyebab ketercapaian target kinerja, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk menindaklanjuti faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappelitbangda Prov. Sulsel dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah Bappelitbangda Prov. Sulsel dan nama dan tanda tangan kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel serta stempel Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

Dalam penyusunan Renja-PD yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, dan yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra-PD adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan dan hambatan/ permasalahan yang dihadapi sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melampaui target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra-PD

Tahun 2021 merupakan tahun yang masih dipenuhi dengan refocussing dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dikarenakan dampak pandemic Covid-19. Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah tetap berupaya untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 dan pencapaian Renstra-PD sampai dengan tahun 2022, sebagaimana terinci dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2022
(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub kegiatan - Berdasarkan Perubahan Renstra-PD Tahun 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)					Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
1					2					3					4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																			
5 01					Perencanaan																			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd dan APBD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						% peningkatan capaian kinerja program	Persen	0,50	-	0,50	3,68	736,00	0,50	3,68	736,00									
5	01	02	1.01		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	-	1	1	100,00	1	1	10,00									
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen	11	-	2	2	100,00	2	2	18,18									
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			14,09									
5	01	02	1.02		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	Data	15.385	-	2.077	2.077	100,00	2.077	2.077	13,50									
						Jumlah sistem yang dipelihara	Sistem	2	-	2	2	100,00	2	2	100,00									
						Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/Kota	24	-	24	24	100,00	24	24	100,00									
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			71,17									
5	01	02	1.03		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	Kab/Kota	24	-	24	24	100,00	24	24	100,00									
5	01	02	1.03	01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	Dokumen	1	-	1	1	100,00	1	1	100,00									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPd	Dokumen	1	-	1	1	100,00	1	1	100,00									
						Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan	Dokumen	36	-	12	12	100,00	12	12	41,67									
5	01	02	1.03	03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	4	-	4	4	100,00	4	4	100,00									
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	Laporan	4	-	4	4	100,00	4	4	100,00									
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	Laporan	4	-	4	4	100,00	4	4	100,00									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
5	01	02	1.03	04	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Fasilitas (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	Rekomendasi	24	-	24	24	100,00	24	25	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00			79,19	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	Persen	100,00	-	60	100,00	166,67	80	100,00	100,00	
					% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	Persen	95,00	-	80	100,00	110,07	90	100,00	105,26	
					% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	95,00	-	90	99,06	125,00	90	99,06	104,27	
5	01	03	1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	15	-	5	5	100,00	5	5	33,33	
					Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi	21	-	7	7	100,00	7	7	33,33	
					Jumlah Data dan Informasi Perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Data dan Informasi	24	-	8	8	100,00	8	8	33,33	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	3	-	1	1	100,00	1	1	33,33
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	3	-	1	1	100,00	1	1	33,33
5	01	03	1.01	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Rekomendasi	12	-	4	4	100,00	4	4	33,33
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Rekomendasi	9	-	3	3	100,00	3	3	33,33
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's	Dokumen	3	-	1	1	100,00	1	1	33,33
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	6		2	2	100,00	2	2	33,33	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Rekomendasi	12	-	4	4	100,00	4	4	33,33
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00			33,33	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
1				2		3		4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
5	01	03	1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian		Rekomendasi	21	-	7	7	100,00	7	7	33,33	
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA		Rekomendasi	33	-	11	11	100,00	11	11	33,33	
						Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA		Data dan Informasi	30	-	10	10	100,00	10	10	33,33	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Rekomendasi	9	-	3	3	100,00	3	3	33,33	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen	12	-	4	4	100,00	4	4	33,33	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian		Rekomendasi	12	-	4	4	100,00	4	4	33,33	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Rekomendasi	18	-	6	6	100,00	6	6	33,33	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Pembangunan SDA		Dokumen	12	-	4	4	100,00	4	4	33,33	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA		Rekomendasi	15	-	5	5	100,00	5	5	33,33	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00			33,33	
5	01	03	1.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur		Rekomendasi	6	-	6	6	100,00	6	6	100,00	
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Wilayah		Rekomendasi	6	-	6	6	100,00	6	6	100,00	
						Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dan wilayah		Data dan Informasi	25	-	25	25	100,00	25	25	100,00	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Rekomendasi	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur		Dokumen	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
										Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	Rekomendasi	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rekomendasi	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Kewilayahan	Dokumen	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Kewilayahan	Rekomendasi	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			100,00	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	Persen	9	-	3	11,32	377,33	3	11,32	125,78	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi	11	-	3	3	3	3	3	27,27	
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rekomendasi	6	-	2	2	100,00	2	2	33,33	
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Rekomendasi	3	-	1	1	100,00	1	1	33,33	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			33,33	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi	12	-	1	1	100,00	1	1	8,33	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan	Rekomendasi	3	-	1	1	1	1	1	33,33	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			33,33	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi	16	-	6	5	83,33	7	5	31,25	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rekomendasi	1	-	1	1	100,00	1	1	100,00	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan, Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi	5	-	2	2	100,00	2	2	40,00	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi	6	-	2	2	100,00	2	2	33,33	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Rekomendasi	1	-	1	0	0,00	-	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							75,00			43,33	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	OPD	33	-	11	17	154,55	11	17	51,52	
5	05	02	1.04	01	Penelitian dan Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	Rekomendasi	3	-	1	1	100,00	1	1	33,33	
						Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dibangun	Demplot	1	-	1	0	0,00	-	-	-	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	Jenis	3	-	3	3	100,00	3	3	100,00	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	Penelitian	21	-	7	7	100,00	7	7	33,33	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dn didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM	Produk	9	-	2	2	100,00	3	2	22,22	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							80,00			37,78	
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100,00	-	100,00	101,44	101,44	100,00	101,44	101,44	
						% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						% Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	7	-	3	3	100,00	2	3	42,86	
x	xx	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan perubahan yang tersusun	Dokumen	12	-	4	6	150,00	4	7	58,33	
x	xx	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	Dokumen	24	-	8	8	100,00	8	13	54,17	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							116,67			42,06	
x	xx	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari:										
						- Supervisi SPJ Bulanan	Dokumen	12	-	12	12	100,00	12	15	100,00	
						- SPP/SPM Gaji	Dokumen	14	-	14	14	100,00	14	17	100,00	
						- SPP/SPM Kegiatan	Kegiatan	17	-	17	17	100,00	17	21	100,00	
x	xx	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Laporan	36	-	12	12	100,00	12	12	33,33	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							100,00			86,67	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
1				2		3		4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
x	xx	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan		Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah		Laporan RKBMD	6	-	2	2	100,00	2	3	50,00	
x	xx	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah		Laporan	9	-	3	3	100,00	3	3	33,33	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00			33,33	
x	xx	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		Rata-rata	100	-	100	100	98,00	100	100,00	100,00	
x	xx	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia		Pasang	625	-	200	200	100,00	210	200	32,00	
x	xx	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya		pegawai	625	-	200	196	98,00	210	246	39,36	
x	xx	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas & fungsi		persen	100	-	100	100	100,00	100	125	100,00	
x	xx	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		Pegawai	625	-	200	0	0,00	210	210	33,60	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									74,50			40,84	
x	xx	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan administrasi umum kantor		Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia		Unit	36	-	12	28	233,33	12	33	91,67	
x	xx	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		Unit	36	-	12	31	258,33	12	36	100,00	
x	xx	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran		Persen	100	-	100	0	0,00	100	0	0,00	
x	xx	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		Orang	730	-	300	460	153,33	350	543	74,38	
x	xx	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan		Kali	180	-	60	274	456,67	70	294	163,33	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									220,33			75,82	
x	xx	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Jenis Pengadaan aset tak berwujud		Jenis	1	-	1	2	200,00	1	2	200,00	
x	xx	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya		%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									133,33			80,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		Ket.
										Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2		3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13
x	xx	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	-	12	12	100,00	12	15	100,00	
x	xx	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	-	1	1	100,00	1	1	100,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00			100,00	
x	xx	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
x	xx	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	16	-	16	24	150,00	16	24	150,00	
						Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan	Unit	12	-	12	23	191,67	12	23	191,67	
						Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	Unit	4	-	4	7	175,00	4	7	175,00	
x	xx	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Unit	4	-	4	13	325,00	4	13	325,00	
						Jumlah pajak kendaraan operasional roda 2 yang terbayarkan	Unit	3	-	2	5	250,00	2	5	166,67	
						Jumlah pajak kendaraan operasional roda 4 yang terbayarkan	Unit	2	-	1	5	500,00	2	5	250,00	
x	xx	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Jenis	1	-	1	1	100,00	1	1	100,00	
x	xx	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Gedung	2	-	3	3	100,00	2	3	200,00	
x	xx	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Jenis	10	-	12	12	175,00	10	12	210,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								218,52			196,48	

Sumber : eplanning.sulselprov.go.id/monev (data diolah)

Pada tabel 2.1 terlihat berisi Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja-PD Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD sampai dengan Tahun 2022 yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renstra-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Pada kolom Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020 tidak terisi karena adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan. Pada tahun 2020 nomenklatur program dan kegiatan masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berikut penjelasan Tabel 2.1 tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra-PD dari Bappelitbangda Prov. Sulsel:

1. Realisasi capaian kinerja Program Tahun 2021

Dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) indikator program yang direncanakan, tidak terdapat program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun seluruh program memenuhi/melampaui target kinerja dengan rata-rata capaian program sebesar **212,95%**, terdapat 3 (tiga) indikator yang memenuhi target dan 6 (enam) indikator yang melampaui target, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (prioritas), dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **418%**, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu:

➤ *Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD*

Target : **100%**; realisasi : **100%**; capaian kinerja (**100%**)

➤ *Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Program*

Target : **0,5%**; realisasi : **3,68%**; capaian kinerja (**736%**)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program yang memenuhi/ melampaui target kinerja, antara lain:

- 1) Sebahagian besar OPD telah melakukan penginputan e-Monev (Monitoring dan Evaluasi) sesuai jadwal;
- 2) Adanya koordinasi yang intens antar OPD dengan Bappelitbangda Prov. Sulsel sehingga memudahkan operator eMonev dalam penginputan;
- 3) Adanya pendampingan dari pejabat Sub Bagian Program terhadap penginputan eMonev oleh staf operator eMonev; dan
- 4) Tersedianya anggaran yang memadai dalam pemeliharaan sistem.

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **133,91%**, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu:

➤ *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM*

Target : **60%**; realisasi : **100%**; capaian kinerja (**166,67%**)

➤ *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA*

Target : **80%**; realisasi : **100%**; capaian kinerja (**125%**)

➤ *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*

Target : **90%**; realisasi : **99,06%**; capaian kinerja (**110,07%**)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi/melampaui target kinerja dikarenakan efektifnya koordinasi dan komunikasi antara Bappelitbangda dan OPD mitra dalam penyusunan Dokumen dan Rekomendasi.

- c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (prioritas), dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **377,33%**, memiliki 1 (satu) indikator, yaitu:

➤ *Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah*

Target : **3%**; realisasi : **11,32%**; capaian kinerja (**377,33%**)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi/ melampaui target kinerja dikarenakan terdapat 6 (enam) dari 53 (lima puluh tiga) OPD/Satker yang memperoleh penghargaan dalam Innovation Government Award (IGA) Tahun 2021. Hal ini didukung oleh tersedianya peraturan terkait inovasi yang memadai, antara lain:

- 1) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386-389;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
- 4) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,48%**, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu:

➤ *Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah*

Target : **100%**, realisasi : **101,44%**, capaian kinerja (**101,44%**)

➤ *Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik*Target : **100%** realisasi : **100%**, capaian kinerja (**100%**)➤ *Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP*Target : **100%** realisasi : **100%**, capaian kinerja (**100%**)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi/melampaui target kinerja, yaitu:

- 1) Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara lingkup Bappelitbangda Prov. Sulsel dan OPD terkait;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai; dan
- 3) Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

2. Realisasi capaian kinerja Kegiatan Tahun 2021

Dari 18 (delapan belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan yang direncanakan, terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan”*.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan, dikarenakan kegiatan rekomendasi dari penelitian *“Penyusunan Master Plan Pemanfaatan Gas Alam sebagai Sumber Energi dan Bahan Baku Industri Petrokimia”* tidak terlaksana akibat dari refocusing anggaran akibat pandemic covid-19 serta BPPT selaku pelaksana dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga MoU harus diperbaharui.

Adapun terdapat 17 (enam belas) kegiatan yang memenuhi/ melampaui target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar **101,44%**, dengan 1 (satu) indikator yang memenuhi target dan 23 (dua puluh tiga) indikator yang melampaui target,

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja kegiatan yang memenuhi/melampaui target kinerja, yaitu:

- 1) Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara lingkup Bappelitbangda Prov. Sulsel dan OPD terkait;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- 3) Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; dan
- 4) Tersedianya anggaran yang memadai dalam pemeliharaan sistem.

3. Realisasi capaian kinerja Sub Kegiatan Tahun 2021

Terdapat 5 (lima) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu: a). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; b). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; c). Penyediaan Bahan Material; d). Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral; dan e). Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja sub kegiatan, antara lain:

- Adanya mutasi pindah masuk maupun aparatur yang memasuki purna bakti yaitu sub kegiatan a). *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*;
- Adanya kebijakan Refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 sehingga tidak terlaksana yaitu, sub kegiatan a). *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*; dan b). *Penyediaan Bahan Material*;
- Adanya kebijakan Refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 sehingga pembangunan demplot Marine Aquaculture tidak terlaksana pada indikator sub kegiatan “*Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan indikator*”; dan
- Adanya kebijakan Refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 dikarenakan kegiatan penelitian “*Penyusunan Master Plan Pemanfaatan Gas Alam sebagai Sumber Energi dan Bahan Baku Industri Petrokimia*” tidak terlaksana akibat dari refocusing anggaran serta BPPT selaku pelaksana dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga MoU harus diperbaharui.

Adapun terdapat 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan yang memenuhi/melebihi target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar **79,97%** dari 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) indikator sub kegiatan yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja kegiatan yang memenuhi/melebihi target kinerja, yaitu:

- 1) Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara lingkup Bappelitbangda Prov. Sulsel dan OPD terkait;
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - 3) Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; dan
 - 4) Tersedianya anggaran yang memadai dalam pemeliharaan sistem.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target kinerja sesuai Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran dan terhadap program yang realisasinya melebihi target kinerja adalah bentuk prestasi kinerja dari Bappelitbangda Prov. Sulsel yang berdampak terhadap upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan adalah:

- a. Perlu adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang terarah serta relevansi antara kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia;
- b. Perlu juga adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam memahami aturan-aturan yang terbaru pada saat pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan atau kerjasama kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- d. Perlu memasukkan sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya dan tahun akhir periode RPJMD Prov. Sulsel 2018-2023 untuk memenuhi ketercapaian target kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bappelitbangda adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai Badan Perencanaan tetap berusaha mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari hal tersebut. Bappelitbangda Prov. Sulsel berperan aktif dalam koordinasi antarpelaku pembangunan, mengawal keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel didasarkan pada kajian evaluasi pencapaian kinerja pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan Bappelitbangda Prov. Sulsel, maka ditetapkan sasaran kinerja yang merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan Bappelitbangda Prov. Sulsel, dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah sekaligus merupakan tahun perubahan dimana terjadi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan dituangkan dalam Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023. Sehingga dengan perubahan tersebut, maka terdapat beberapa indikator sasaran Bappelitbangda Tahun 2021 yang tidak terdapat pada indikator sasaran Tahun 2020, sehingga terdapat beberapa kinerja antara tahun 2020 dan 2021 yang tidak dapat diperbandingkan.

Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Pada tahun 2021, persentase capaian sasaran kinerja sebesar **107%** dengan 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu “*Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%*”, dengan tingkat capaian sebesar **98%**.

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja, realisasi sampai **dengan akhir Januari Tahun 2022** sebesar **90,6%** dengan target kinerja yang ingin dicapai sebesar **92.5**. Capaian ini rendah karena hanya terdapat 144 (seratus empat puluh empat) Indikator Program Prioritas yang capaian hasilnya mencapai minimal 75% dari 159 (seratus lima puluh sembilan) program prioritas. Banyak faktor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai, dan sebagian besar merupakan faktor eksternal. Salah satunya adalah terjadinya pandemic covid-19 menyebabkan dilakukan realokasi anggaran pada semua perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pengalokasian anggaran yang direncanakan untuk pencapaian indikator kinerja menjadi berkurang.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel secara rinci pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024*	2021	2022*	2023	2024	
1.	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
	Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD			96%	96,5%	97%	98%	100%	-	97%	98%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
	Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%			92,5%	92,5%	93%	94%	90,6%	-	93%	94%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024*	2021	2022*	2023	2024	
	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
2.	Prosentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Inovasi Daerah			20%	30%	40%	50%	20%	-	40%	50%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
3.	Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)			95%	96%	97%	98%	146,22 %	-	97%	98%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
	Nilai SAKIP OPD			80%	81%	83%	84%	80%	-	83%	84%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
	Persentase Temuan Material			0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	-	0,05%	0,05%	Indikator mengacu pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun (2022)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur, Bappelitbangda Prov. Sulsel dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang profesional, yang dapat mengakomodir pembangunan dalam berbagai aspek, yang terwujud dalam kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan dokumen perencanaan dan pembinaan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dengan berpedoman pada RPJMD, Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berupaya dengan meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan, dan juga memberikan informasi hasil kegiatan kelitbangan serta inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan analisis, dinamika peraturan perundang-undangan dan perkembangan dinamika pembangunan maka dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Ketersediaan data/informasi terkini yang belum akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan perbedaan sumber data/informasi;
2. Terjadinya refofussing anggaran sebagai dampak dari penanganan pandemic covid 19 sehingga alokasi dana untuk pembangunan tidak maksimal;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya;
5. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM demi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
6. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional Perencana maupun Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa;
7. Pemanfaatan hasil penelitian belum optimal dijadikan acuan perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
8. Masih rendahnya komitmen OPD dalam menghasilkan inovasi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapain visi dan misi Kepala Daerah. Karena itu perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapain visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bappelitbangda Prov. Sulsel menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Tingginya tuntutan penyusunan dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan konsisten dengan penganggaran, diantaranya penyediaan dokumen RKPD Provinsi dalam rangka untuk meraih nominasi kategori terbaik ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan setiap tahun;

- c. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- d. Terdapat perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian) terkait dengan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi;
- e. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah;
Diantaranya terbitnya Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini mendorong tuntutan bagi SDM Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut;
- f. Belum tersedianya data base penelitian dan pengembangan yang akurat dan terkini untuk mendukung kebutuhan data/informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan penelitian dan pengembangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis; dan
- g. Belum ada ajang/event yang memberikan apresiasi OPD Terinovatif kepada OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, antara lain:

- 1) Terjalinnnya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan dengan leading sector;
- 2) Tersedianya eMONEV dalam aplikasi SIPPD yang berkualitas guna mempermudah koordinasi, monitoring maupun evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda; dan
- 4) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan, penelitian dan inovasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel, maka diformulasikan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai berikut :

- a) Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan;

- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c) Peningkatan konsistensi dokumen (RPJMD/RKPD) Provinsi dengan dokumen Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
- d) Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra-PD/Renja-PD) serta dokumen penganggaran (RKA/DPA dan APBD);
- e) Penyempurnaan integrasi aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*) maupun sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (*e-Budgeting* dan *e-RKBMD*), yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga tercapai konsistensi dan transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f) Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan;
- g) Peningkatan kapasitas penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa dan staf Bappelitbangda Prov. Sulsel melalui kegiatan workshop dan FGD;
- h) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi; dan
- i) Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Perumusan Rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan awal dari seluruh proses rancangan RKPD dan memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rancangan Renja-PD Tahun 2023 dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 telah mempedomani Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan dan arahan dari pimpinan yang disesuaikan dengan ketetapan dari TAPD Prov. Sulsel, maka terdapat beberapa perubahan dan mempengaruhi pagu indikatif yang semula **Rp. 79.302.218.104,-** kemudian berkurang menjadi **Rp. 59,142,024,852,.** Selain itu, terdapat penambahan beberapa sub kegiatan baru yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk memenuhi ketercapaian target akhir Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

Berikut hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
(Indikator Sub Kegiatan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Nama Perangkat Daerah : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	46.860.021.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	36,702,774,860	
			% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Minimal Baik	100%				% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		
			% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%				% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.058.956.216	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	630,576,528	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	67,000,376	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	270.564.755	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24,073,000	Penambahan Sub Kegiatan ini untuk memenuhi target kinerja yaitu dokumen RKA-SKPD
1.3						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	24,073,000	Penambahan Sub Kegiatan ini untuk memenuhi target kinerja yaitu dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	44,400,000	
1.5						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40,000,000	Penambahan Sub Kegiatan ini untuk memenuhi target kinerja yaitu dokumen Perubahan DPA-SKPD
1.6	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	538.391.460	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	431,030,152	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	39.571.058.941	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	29,111,762,660	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sulsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	39.141.058.941	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sulsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	28,692,872,532	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	319,290,528	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	130.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	99,599,60	
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah		% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%	130.000.000	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah		% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%	119,358,200	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21,159,900	
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	70.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	98,198,300	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100	692.810.852	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100	657,036,300	
4.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	215 Paket	207.830.150	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	215 Paket	307,015,000	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	215 Dokumen	147.607.926	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	215 Dokumen	127,282,200	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sulsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	190.951.556	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sulsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	64,025,300	
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Sulsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215 Orang	146.421.220	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Sulsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215 Orang	158,713,800	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.915.077.238	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1,782,484,200	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	165.059.976	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	120,605,900	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	169.351.970	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	206,114,900	
5.3	Penyediaan Bahan/Material	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	149.354.700	Penyediaan Bahan/Material	Prov. Sulsel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	89,795,100	
5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	335.494.526	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	194,609,500	
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	1.095.816.066	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	1,171,358,800	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.136.622.270	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	589,567,600	
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	80.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	0	Tidak dianggarkan dan dilaksanakan
6.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	119.360.010	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5,197,600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	174.491.900,00	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Tidak dianggarkan dan dilaksanakan
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	762.770.360,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	584,370,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	190.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,100,608,312	
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117,604,000	
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	983,004,312	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	2.164.996.010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	2,711,381,060	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sulsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 unit	539.116.626	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sulsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	726,481,000	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	212.165.276	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	334,163,000	
8.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Prov. Sulsel	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	179.048.126	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Prov. Sulsel	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	105,347,500	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	745.289.156	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	752,059,560	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	489.376.826	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	793,330,000	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)		% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	15.713.198.815	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)		% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	12,997,160,980	
			Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%				Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%		
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%	3.512.745.848	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%	3,248,321,000	
9.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	951.708.524	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Prov. Sulsel	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	479,530,000	
9.2	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	2.561.037.324	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	2,768,791,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	430.984.024	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	254,417,000	
10.1	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1046 Masukan	430.984.024	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1046 Masukan	254,417,000	
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	11.769.468.943	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	9,494,422,980	
			Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%		
11.1	Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	9.530.173.224	Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	8,299,840,280	
11.2	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1.633.489.695	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	864,759,200	
11.3	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	48 Dokumen	605.806.024	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	48 Dokumen	329,823,500	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	100%	9.736.497.760	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	100%	4,198,367,792	
			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	95%				% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	95%		
			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%				% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%		
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi	1.975.716.219	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi	1,464,251,704	
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi				Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi		
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi		
12.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	136,571,152	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	213.960.100	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	181,940,000	
12.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	361.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	271,700,000	
12.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	622.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	287,968,952	
12.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	17 Perangkat Daerah	498.756.119	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	17 Perangkat Daerah	231,851,888	
12.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	250.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	354,219,712	
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	2.065.781.542	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	1,148,807,480	
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	10 Jumlah Data dan Informasi				Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	10 Jumlah Data dan Informasi		
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	11 Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	11 Rekomendasi		
13.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	225.957.835	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,008,476	
13.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	232.328.122	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	155,925,476	
13.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	492.376.482	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	255,372,976	
13.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	228.241.105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD danRKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,570,800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	7 Perangkat Daerah	238.542.561	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	7 Perangkat Daerah	158,270,376	
13.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	7 Laporan	648.335.439	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	7 Laporan	278,659,376	
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi	5.475.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi	1,585,308,608	
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Wilayah	25 data dan informasi				Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Wilayah	25 data dan informasi		
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	6 rekomendasi				Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	6 rekomendasi		
14.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	198,412,752	
14.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	210.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	151,690,876	
14.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	3.950.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	662,421,952	
14.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	475.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	170,386,376	
14.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Wilayah	3 Perangkat Daerah	140.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Prov. Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Wilayah	3 Perangkat Daerah	139,047,976	
14.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Wilayah	3 Laporan	300.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Wilayah	3 Laporan	263,348,676	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%	6.992.500.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%	5,243,721,220	
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 rekomendasi	1.380.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 rekomendasi	1,150,711,104	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	225.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	94,981,100	
15.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	880.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	355,821,152	
15.3	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	275.000.000	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	699,908,852	
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi	1.512.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 rekomendasi	1.120.935.552	
16.1	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	440.000.000	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	587.981.800	
16.2	Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	275.000.000	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	240.765.700	
16.3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	385.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0	Tidak dianggarkan dan dilaksanakan karena direncanakan di tahun 2022 akan dilaksanakan penelitian pencapaian rekomendasi sesuai target akhir dari Renstra Tahun 2018-2023 terpenuhi
16.4	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	412.500.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	292,188,052	
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 rekomendasi	1.530.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Rekomendasi	1,369,357,780	
17.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	880.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	589,581,180	
17.2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	400.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	273,439,800	
17.3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	506,336,800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pengembangan inovasi dan teknologi		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD	2.570.000.000	Pengembangan inovasi dan teknologi		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD	1,602,716,784	
18.1	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	550.000.000	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1,109,040,102	
18.2	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	400.000.000	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	139,084,954	
18.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	300.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	196,912,676	
18.4	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	385.000.000	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	74,049,200	
18.5	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	935.000.000	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	83,629,852	
TOTAL					79.302.218.104	TOTAL				59,142,024,852	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappelitbangda Prov. Sulsel tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Prov. Sulsel Tahun 2022 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan *politik*, *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2021, evaluasi kebijakan pembangunan Tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dinamika pandemi covid-19 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Tema Pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “*Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, dengan Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 1:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Prioritas Nasional 4:** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Prioritas Nasional 5:** Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk mewujudkan Tema RKP Tahun 2023 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 adalah:

- 1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Lebih lanjut, indikator pembangunan dan target sasaran Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
4	Rasio Gini (indeks)	0,375 – 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31 – 73,49
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
7	Nilai Tukar Petani (%)	103 – 105
8	Nilai Tukar Nelayan (%)	106 – 107

Sumber : RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023

Sebagai RKP tahun keempat yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang merupakan tahun kelima (terakhir) RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, serta dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah, maka dukungan Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 yang sejalan dengan kebijakan Nasional dan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta mampu bersaing dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Bappelitbangda Prov. Sulsel harus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Adapun perubahan-perubahan tersebut disusun dengan melalui tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dan *outcome*. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis Perangkat Daerah, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Adapun Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung **lima pokok** visi di dalamnya yakni *inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter*. Kelima pokok Visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang *“Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”*.

Adapun untuk mewujudkan **Visi** tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan **Misi** sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Misi 1 | Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif |
| Misi 2 | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel |
| Misi 3 | Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif |
| Misi 4 | Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |
| Misi 5 | Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan |

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan daerah sehingga menjadi motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan, maka Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan lebih menitikberatkan perannya dalam pencapaian **Misi Pertama** yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif”**.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan serta didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 sebagai periode akhir dari turunan penjabaran Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1. Perencanaan	1. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	1. Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	97%
			2. Nilai SAKIP OPD	83%
			3. Persentase Temuan Material	0,05%
	2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	2. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%
			2. Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	97%
			3. Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	93%
			4. Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	100%
2. Penelitian dan Pengembangan		3. Meningkatkan inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	1. Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Inovasi Daerah	40%

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel pada Tahun 2023 dengan mempertimbangan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, maka Bappelitbangda menjabarkan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah dan yang disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Bappelitbangda Prov. Sulsel telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

3. Pengentasan kemiskinan, merupakan faktor yang mesti diperhatikan dalam merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan diimplementasikan untuk merumuskan kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan tersebut. Melalui dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023, maka Bappelitbangda Prov. Sulsel merumuskan upaya akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan, diantaranya pembentukan Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD). Melalui kegiatan dimaksud harapannya berimplikasi langsung mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang Sejahtera.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas pendanaan di Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 memperhatikan Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, capaian RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Akomodasi terhadap isu strategis dilakukan melalui pembinaan terhadap perencana OPD dan mengarahkan prioritas penganggaran di Bappelitbangda dan OPD sehingga sesuai dengan prioritas RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023.

Kegiatan inovasi terus didorong dengan memberikan penganggaran pada kegiatan tersebut di OPD terkait. Penganggaran terhadap kondisi New Normal sebagai usaha pemulihan dampak Covid-19 ditahun 2021 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2023.

Adapun Rencana Kerja Prioritas Perangkat Daerah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Bappelitbangda

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran	Sumber Dana
I	PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI (PERBAIKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	12,997,160,980	
				Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%		
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%	3,248,321,000	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	479,530,000	PAD Prov. Sulsel
			Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	2,768,791,000	PAD Prov. Sulsel
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	254,417,000	
			Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1046 Masukan	254,417,000	PAD Prov. Sulsel
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	9,494,422,980	
				Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%		
			Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	8,299,840,280	PAD Prov. Sulsel
II	BERKEMBANGNYA INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%	5,243,721,220	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 rekomendasi	1,150,711,104	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	94,981,100	PAD Prov. Sulsel

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran	Sumber Dana
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	355,821,152	PAD Prov. Sulsel
			Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	699,908,852	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi	1,120,935,552	
			Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	587,981,800	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	240,765,700	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	292,188,052	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 rekomendasi	1,369,357,780	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	589,581,180	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	273,439,800	PAD Prov. Sulsel
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	506,336,800	PAD Prov. Sulsel
			Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD	1,602,716,784	
			Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1,109,040,102	PAD Prov. Sulsel
			Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	139,084,954	PAD Prov. Sulsel
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	196,912,676	PAD Prov. Sulsel
			Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kemitraan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kemitraan	1 Laporan	74,049,200	PAD Prov. Sulsel
			Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	83,629,852	PAD Prov. Sulsel

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah serta untuk pemenuhan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru, Rencana Kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel telah dipetakan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rumusan rencana kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel terdiri dari 2 (dua) Urusan, 4 (empat) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan total pagu pendanaan sebesar **Rp. 59,142,024,852,-** diuraikan secara terperinci pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				59,142,024,852				62,177,815,800
X.X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%		36,702,774,860			100%	38,819,799,725
		% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%					100%	
		% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%					100%	
X.XX.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%		630,576,528			100%	662,105,350
X.XX.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Prov. Sulsel	67,000,376	PAD Prov. Sulsel		2 dokumen	70,350,400
X.XX.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Prov. Sulsel	24,073,000	PAD Prov. Sulsel		1 dokumen	25,276,650
X.XX.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Prov. Sulsel	24,073,000	PAD Prov. Sulsel		1 dokumen	25,276,650
X.XX.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Prov. Sulsel	44,400,000	PAD Prov. Sulsel		1 dokumen	46,620,000
X.XX.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Prov. Sulsel	40,000,000	PAD Prov. Sulsel		1 dokumen	42,000,000
X.XX.01.101.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Prov. Sulsel	431,030,152	PAD Prov. Sulsel		8 Laporan	452,581,650
X.XX.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		29,111,762,660			100%	30,745,452,400
X.XX.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	Prov. Sulsel	28,692,872,532	PAD Prov. Sulsel		194 Orang/ Bulan	30,305,617,800
X.XX.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	Prov. Sulsel	319,290,528	PAD Prov. Sulsel		2400 Dokumen	335,255,000
X.XX.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	Prov. Sulsel	99,599,600	PAD Prov. Sulsel		12 laporan	104,579,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.103	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%		119,358,200			100%	125,326,100
X.XX.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Prov. Sulsel	21,159,900	PAD Prov. Sulsel		2 Dokumen	22,217,900
X.XX.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Prov. Sulsel	98,198,300	PAD Prov. Sulsel		3 Laporan	103,108,200
X.XX.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100		657,036,300			100	689,888,100
X.XX.01.105.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	215 Paket	Prov. Sulsel	307,015,000	PAD Prov. Sulsel		215 Paket	322,365,750
X.XX.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	215 Dokumen	Prov. Sulsel	127,282,200	PAD Prov. Sulsel		215 Dokumen	133,646,300
X.XX.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Prov. Sulsel	64,025,300	PAD Prov. Sulsel		100 Orang	67,226,550
X.XX.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215 Orang	Prov. Sulsel	158,713,800	PAD Prov. Sulsel		215 Orang	166,649,500
X.XX.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%		1,782,484,200			100%	1,871,608,400
X.XX.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Prov. Sulsel	120,605,900	PAD Prov. Sulsel		12 Paket	126,636,200
X.XX.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Prov. Sulsel	206,114,900	PAD Prov. Sulsel		12 Paket	216,420,650
X.XX.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Prov. Sulsel	89,795,100	PAD Prov. Sulsel		1 Paket	94,284,850
X.XX.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Prov. Sulsel	194,609,500	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	204,339,950
X.XX.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Prov. Sulsel	1,171,358,800	PAD Prov. Sulsel		80 Laporan	1,229,926,750
X.XX.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		589,567,600			100%	722,830,500
X.XX.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Prov. Sulsel	5,197,600	PAD Prov. Sulsel		1 Unit	109,242,000
X.XX.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Prov. Sulsel	584,370,000	PAD Prov. Sulsel		10 Unit	613,588,500
X.XX.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		1,100,608,312			100%	1,155,638,750
X.XX.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Prov. Sulsel	117,604,000	PAD Prov. Sulsel		12 Laporan	123,484,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Prov. Sulsel	983,004,312	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	1,032,154,550
X.XX.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%		2,711,381,060			100%	2,846,950,125
X.XX.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 unit	Prov. Sulsel	726,481,000	PAD Prov. Sulsel		41 unit	762,805,050
X.XX.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	Prov. Sulsel	334,163,000	PAD Prov. Sulsel		13 unit	350,871,150
X.XX.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Prov. Sulsel	105,347,500	PAD Prov. Sulsel		1 Unit	110,614,875
X.XX.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Prov. Sulsel	752,059,560	PAD Prov. Sulsel		2 Unit	789,662,550
X.XX.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	Prov. Sulsel	793,330,000	PAD Prov. Sulsel		10 Unit	832,996,500
5.01	PERENCANAAN					17.195.528.772		18.042.827.975	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%		12,997,160,980			100%	13,687,013,525
		Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%					0,5%	
5.01.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%		3,248,321,000			100%	3,406,169,550
5.01.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Prov. Sulsel	479,530,000	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	498,939,000
5.01.02.101.06	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	Prov. Sulsel	2,768,791,000	PAD Prov. Sulsel		2 Dokumen	2,907,230,550
5.01.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%		254,417,000			100%	267,137,850
5.01.02.102.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1046 Masukan	Prov. Sulsel	254,417,000	PAD Prov. Sulsel		1046 Masukan	267,137,850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Prov. Sulsel	9,494,422,980			100%	10,013,706,125
		Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%					100%	
5.01.02.103.01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Prov. Sulsel	8,299,840,280	PAD Prov. Sulsel		2 Laporan	8,714,832,300
5.01.02.103.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Prov. Sulsel	864,759,200	PAD Prov. Sulsel		4 Laporan	952,559,150
5.01.02.103.04	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	48 Dokumen	Prov. Sulsel	329,823,500	PAD Prov. Sulsel		48 Dokumen	346,314,675
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	100%		4,198,367,792			100%	4,355,814,350
		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	95%					95%	
		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%					95%	
5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi		1,464,251,704			5 Rekomendasi	1,537,464,400
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi					8 Jumlah data dan informasi	
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi					7 Rekomendasi	
5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Prov. Sulsel	136,571,152	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	143,399,700
5.01.03.101.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	181,940,000	PAD Prov. Sulsel		5 Perangkat Daerah	191,037,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.101.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Prov. Sulsel	271,700,000	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	285,285,000
5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Prov. Sulsel	287,968,952	PAD Prov. Sulsel		4 Dokumen	302,367,500
5.01.03.101.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	17 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	231,851,888	PAD Prov. Sulsel		17 Perangkat Daerah	243,444,500
5.01.03.101.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Prov. Sulsel	354,219,712	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	371,930,700
5.01.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi		1,148,807,480			7 Rekomendasi	1,206,247,875
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	10 Jumlah Data dan Informasi					10 Jumlah Data dan Informasi	
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	11 Rekomendasi					11 Rekomendasi	
5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Prov. Sulsel	150,008,476	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	157,508,900
5.01.03.102.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	155,925,476	PAD Prov. Sulsel		7 Perangkat Daerah	163,721,750
5.01.03.102.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	Prov. Sulsel	255,372,976	PAD Prov. Sulsel		7 Laporan	268,141,625
5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Prov. Sulsel	150,570,800	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	158,099,350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.102.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	7 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	158,270,376	PAD Prov. Sulsel		7 Perangkat Daerah	166,183,900
5.01.03.102.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	7 Laporan	Prov. Sulsel	278,659,376	PAD Prov. Sulsel		7 Laporan	292,592,350
5.01.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi		1,585,308,608			6 rekomendasi	1,612,102,175
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Wilayah	25 data dan informasi					25 data dan informasi	
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	6 rekomendasi					6 rekomendasi	
5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Prov. Sulsel	198,412,752	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	208,333,400
5.01.03.103.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	151,690,876	PAD Prov. Sulsel		4 Perangkat Daerah	159,275,400
5.01.03.103.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Prov. Sulsel	662,421,952	PAD Prov. Sulsel		4 Laporan	643,071,200
5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Prov. Sulsel	170,386,376	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	178,905,700
5.01.03.103.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Wilayah	3 Perangkat Daerah	Prov. Sulsel	139,047,976	PAD Prov. Sulsel		3 Perangkat Daerah	146,000,375
5.01.03.103.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Wilayah	3 Laporan	Prov. Sulsel	263,348,676	PAD Prov. Sulsel		3 rekomendasi	276,516,100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.243.721.220				5.315.188.100
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%		5,243,721,220			3%	5,315,188,100
5.05.02.101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 rekomendasi		1,150,711,104			4 rekomendasi	1,176,032,650
5.05.02.101.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Prov. Sulsel	94,981,100	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	99,730,150
5.05.02.101.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	Prov. Sulsel	355,821,152	PAD Prov. Sulsel		2 Laporan	341,398,200
5.05.02.101.14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	Prov. Sulsel	699,908,852	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	734,904,300
5.05.02.102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi		1,120,935,552			4 rekomendasi	1,270,771,100
5.05.02.102.01	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Prov. Sulsel	587,981,800	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	617,380,900
5.05.02.102.02	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Prov. Sulsel	240,765,700	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	287,111,800
5.05.02.102.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Prov. Sulsel	292,188,052	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	366,278,400
5.05.02.103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 rekomendasi		1,369,357,780			5 rekomendasi	1,421,949,700
5.05.02.103.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	Prov. Sulsel	589,581,180	PAD Prov. Sulsel		2 Dokumen	600,307,250
5.05.02.103.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Prov. Sulsel	273,439,800	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	287,111,800
5.05.02.103.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Prov. Sulsel	506,336,800	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	534,530,650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.104	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD		1,602,716,784			11 OPD	1,446,434,650
5.05.02.104.01	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Prov. Sulsel	1,109,040,102	PAD Prov. Sulsel		1 Dokumen	928,140,500
5.05.02.104.02	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Prov. Sulsel	139,084,954	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	145,972,850
5.05.02.104.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Prov. Sulsel	196,912,676	PAD Prov. Sulsel		3 Laporan	206,758,300
5.05.02.104.04	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Prov. Sulsel	74,049,200	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	77,751,650
5.05.02.104.05	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Prov. Sulsel	83,629,852	PAD Prov. Sulsel		1 Laporan	87,811,350
TOTAL PAGU					59,142,024,852				62,177,815,800

BAB V

PENUTUP

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Penyusunan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Perangkat Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Catatan Penting⁸

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Sulawesi Selatan periode 2018-2023;
- b. Penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 ini berpedoman pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan; dan
- c. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 juga mengacu pada nomenklatur yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023;
- b. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Prov. Sulsel. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Prov. Sulsel; dan

- c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan) terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.

Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran, tanggungjawab dan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait demi tercapainya sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menopang keberhasilan terhadap program-program prioritas pembangunan.

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan, maka selanjutnya Renja ini diharapkan menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023.

Makassar, 11 Juli 2022

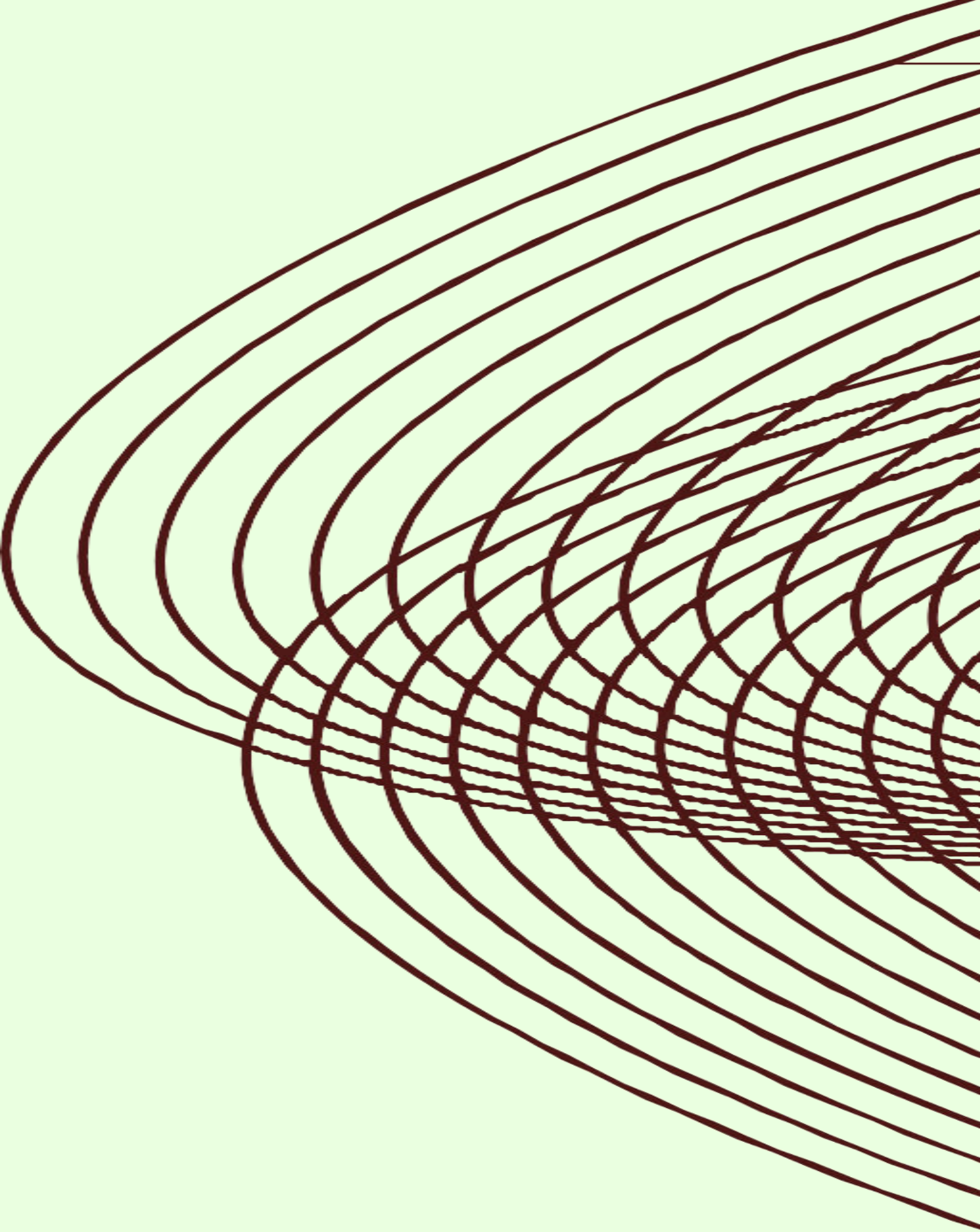
Kepala Badan,

TTD

Ir. A. Darmawan Bintang, M.DevPlg

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670427 199303 1 015



JL

**BAPPELITBANGDA
SULAWESI SELATAN**



makassar 70231

Phone : (0411) 453846
Instagram : bappelitbandasulsel

c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan) terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.

Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran, tanggungjawab dan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait demi tercapainya sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menopang keberhasilan terhadap program-program prioritas pembangunan.

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan, maka selanjutnya Renja ini diharapkan menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023.

Makassar, 11 Juli 2022

Kepala Badan,


Ir. A. Darmawan Bintang, M.DevPlg
 Pandkat Pembina Utama Madya
 NIP. 19670427 199303 1 015